

**DIALETIKA DEDI MULYADI
DALAM PERSPEKTIF ILMU PEMERINTAHAN**Wawan Gunawan¹Harky Ristala²

*^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi*

Alamat email Koresponden: gunawan.wawan@lecture.unjani.ac.id

ABSTRACT

Dedi Mulyadi, better known as DM, the Governor of West Java for the 2025-2030 period, has a unique approach to formulating government policies, differing from conventional bureaucracies in general. DM prefers a direct and responsive approach based on data and facts obtained by carrying out straightforward execution. It is therefore not surprising that at the beginning of his leadership, DM was able to achieve West Java's budget efficiency of up to Rp. 5 trillion, which directly impacted the community in the areas of health, education, road infrastructure, and electricity networks. In addressing community issues such as the environment, education, and health, DM does not wait for protracted academic studies but goes directly to the field to take action against violations and execute them. This paper analyzes the dialectic in the West Java government under DM's leadership, especially in the decision-making process that considers various perspectives. The approach used is a dialectical case study from a dynamic governance perspective. A dialectical approach will respond to challenges with solutions combining various perspectives. This approach can align with the concept of dynamic governance, which emphasizes the importance of leaders having dynamic capabilities to think ahead, rethink, and think across sectors. This way, the resulting policies can be immediately implemented and have a direct impact on society. Thus, the DM's direct approach can be a more progressive model than conventional approaches, but it requires a balance between speed of execution and legal and administrative aspects.

Keywords: *Dialectics, Government Science, Dedi Mulyadi*

PENDAHULUAN

Kerinduan masyarakat terhadap sosok pemimpin yang inovatif-progresif, sekaligus kejenuhan masyarakat terhadap patologi birokrasi, sepertinya berhasil “ditangkap” oleh seorang Dedi Mulyadi (DM) yang kemudian digabungkan dengan kemajuan teknologi digital. DM berhasil menampilkan dirinya sebagai sosok yang merakyat alias tidak elitis, bukan sebagai “priyayi” atau manusia yang bercokol di menara gading yang selama ini dipertontonkan oleh elit politik yang menjadi kepala daerah. Jabatan gubernur tidak lagi disakralkan, bukan lagi “pangagung” yang gila sanjung. Ini satu sisi.

Di sisi lain, perkembangan zaman yang sangat cepat membuat pemimpin dalam sebuah organisasi harus selalu sigap, cepat tanggap serta mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat, tidak lagi harus menunggu skala prioritas melalui debat dengan legislatif yang sarat kepentingan. Oleh sebab itu dibutuhkan, bukan saja pengalaman, kapasitas dan kapabilitas, namun juga diperlukan keberanian yang cukup untuk membongkar tradisi birokrasi yang selama ini mengabdikan kepada pejabat, bukan mengabdikan kepada kepentingan masyarakat.

Kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan serta tuntutan masyarakat yang berubah seiring dengan perubahan zaman dan tercipta pemerintahan yang adaptif atau dinamis, sekaligus progresif. Seperti disampaikan Neo Boon Shiong bahwa untuk menciptakan pemerintahan dinamis dibutuhkan pemimpin yang memiliki kapabilitas dinamis dan keinginan untuk berubah yang konstruktif, sebab korupsi diam-diam menjadi korupsi kolektif, juga berubah namanya. Yang dimaksud di sini adalah berubah ke arah yang lebih baik menurut kehendak masyarakat, bukan berubah atas kehendak elit politik

Sosok DM menawarkan gagasan praktis, taktis serta berani menerobos kebekuan kinerja birokrasi. Gaya kepemimpinan sangat khas

memadukan kemajuan digital, pendekatan budaya lokal dengan kebijakan publik. DM atau memiliki perjalanan politik yang panjang dan kaya akan pengalaman di berbagai tingkat pemerintahan. Karier politiknya dimulai tahun 1999 sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, selanjutnya Wakil Bupati Purwakarta dari tahun 2003 hingga 2008. Dan menjadi Bupati Purwakarta selama dua periode tahun 2008 hingga 2018, dan sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030.

DM memiliki pendekatan yang unik dalam merumuskan kebijakan pemerintah, berbeda gaya dengan birokrasi konvensional yang sering kali mengandalkan rapat berkepanjangan, studi banding, dan eksekusi yang lambat. Berbeda dengan DM yang lebih memilih pendekatan secara langsung dan responsif berdasarkan data dan fakta yang didapatkan dengan melakukan eksekusi secara langsung, kendati tidak sedikit pihak yang mengkritiknya, terutama dari elit politik yang selama ini mendapatkan benefit dari anggaran dan kebijakan yang ada.

DM dapat membuat efisiensi anggaran Jawa Barat mencapai Rp. 5 triliun yang berdampak langsung kepada masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, dan jaringan listrik, pengurangan belanja barang dan jasa berhasil Rp. 7,6 triliun menjadi Rp. 7,1 triliun, realokasi anggaran perjalanan dinas sebelumnya Rp. 700 miliar dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan sehingga total anggaran infrastruktur menjadi Rp. 2,4 triliun (Kompas19/5/2025).

Proses administrasi pemerintahan sering kali terjebak dalam prosedur normatif yang memperlambat implementasi kebijakan. Banyak pemimpin mengandalkan mekanisme birokrasi yang panjang berbelit-belit sebelum mengambil keputusan. Namun sosok DM menawarkan kepemimpinan atau pendekatan yang berbeda dengan pemimpin pemerintahan lainnya dimana beliau langsung turun ke lapangan, mengidentifikasi masalah, dan segera mengambil tindakan. Seperti

gebrakan yang tidak lazim untuk standar pejabat negara yang bermain dengan kata-kata normatif, janji manis serta selalu menjaga citra “bangsawan” yang harus dihormati dan dilayani. Lain dengan DM yang sanggup memecat, membongkar, melarang dan mengacak-acak tatanan yang sudah puluhan tahun dibiarkan seperti itu oleh para pendahulunya (Ali Damanik LinkedIn, 4/18/2025).

Gaya kepemimpinan DM memiliki beberapa dimensi yang menarik untuk dianalisis salah satunya adalah pendekatan populis yang tampak dalam kedekatannya kepada masyarakat (Warta Global, 4/25/2025). Sejak menjabat sebagai gubernur DM sering turun langsung ke lapangan membersihkan sungai, menanam pohon, dan menegur pihak yang merusak lingkungan (LEAD.co.id 10/3/2025) bahkan DM pernah mencabut izin bangunan demi pelestarian lingkungan, menutup tambang ilegal di daerah Subang, larangan bagi kepala sekolah melakukan study tour dan wisuda karena banyak orang tua yang terlilit pinjol dan rentenir (LinkedIn 4/18/2025) dimana Jawa Barat juga termasuk provinsi yang tertinggi di Indonesia dalam penggunaan pinjol berdasarkan data OJK mencapai Rp. 19,88 triliun pada Januari 2025 yang merupakan 25% dari total pinjol nasional.

Dengan berbagai permasalahan politik yang ada di masyarakat DM banyak melakukan gebrakan yang memberikan kemudahan dan membantu masyarakat seperti program bantuan sosial jumlah penerima mengalami peningkatan sampai 15% dan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan ekonomi daerah naik Jawa Barat dari 5,2% menjadi 5,8% dalam satu tahun pertama kepemimpinannya, pengurangan angka kemiskinan Jawa Barat dari 7,1% menjadi 6,5% dalam periode awal kepemimpinannya, dan peningkatan investasi masuk ke Jawa Barat meningkat 20% sehingga banyak proyek infrastruktur dan industri.

Dalam era politik yang terus berkembang dinamika komunikasi politik dan gaya kepemimpinan telah mengalami transformasi yang signifikan. Sehingga DM muncul sebagai tokoh yang menonjol dengan penampilan kerap melibatkan aksi langsung di tengah masyarakat dan langsung menyelesaikan masalah masyarakat tanpa melakukan administrasi yang lambat atau lama yang langsung secara to the point. Pendekatan ini menarik untuk dikaji dalam perspektif ilmu pemerintahan, terutama dalam konteks efektivitas kebijakan publik.

DM merupakan tokoh politik Indonesia, menawarkan model kepemimpinan yang berbeda dari pendekatan yang selama ini ada. DM dikenal dengan gaya kepemimpinan taktis dan langsung dalam merumuskan kebijakan. Alih-alih mengandalkan rapat panjang dan prosedur administratif yang kompleks, DM lebih memilih untuk turun langsung ke lapangan, mengidentifikasi masalah secara langsung, dan segera mengambil tindakan.

Hal ini sejalan dengan teori adaptive leadership yang dikembangkan oleh Ronal Heifetz pemimpin yang efektif harus beradaptasi dengan situasi berubah dan mengambil tindakan langsung tanpa terjebak dalam prosedur administratif bertele-tele, tetapi langsung mengidentifikasi masalah, mengambil keputusan cepat, menghindari birokrasi berlebihan, dan mendorong inovasi dan fleksibilitas.

Selain itu teori good governance yang menekankan pentingnya efektifitas, efisiensi, dan responsivitas dengan memilih langsung tindakan daripada rapat berkepanjangan atau studi banding sehingga apa yang dilakukan DM sudah sangat bagus dan baik terutama menjadi pemimpin yang langsung melakukan eksekusi dengan menyelesaikan masalah untuk kesejahteraan masyarakat, terbukti dengan pengurangan beberapa anggaran dan dialokasikan untuk menyelesaikan masalah lainnya, terutama dalam pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, maupun sosial.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menganalisis dialetika dalam pemerintahan di Jawa Barat di bawah kepemimpinan DM terutama dalam proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan berbagai perspektif. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dialektis dalam perspektif dynamic governance. Pendekatan dialektis akan merespon tantangan dengan solusi menggabungkan berbagai sudut pandang. Pendekatan ini dapat sejalan dengan konsep dynamic governance yang menekankan pentingnya pemimpin memiliki kapabilitas dinamis berpikir ke depan, berpikir ulang, dan berpikir lintas sektor dengan ini kebijakan yang dihasilkan dapat langsung cepat diterapkan dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat..

KERANGKA TEORI

Dialetika

Jika ditelisik ke masa klasik, dialektika sering dirumuskan sebagai cara berpikir yang dinamis, terutama menghadap-hadapkan gagasan, ide atau pemikiran yang bersebrangan lalu kemudian di carikan semacam irisannya, komprominya ke dalam bentuk *synthesis*. Thesis yang berhadapan dengan *antithesis*, harus sampai kepada apa yang kemudian disebut sebagai *synthesis*.

Dalam bahasa Inggris yaitu *dialectic* berasal dari bahasa Yunani *dialektos* yang artinya pidato pembicaraan dan perdebatan. Dialetika mengembangkan pemikiran melalui tesis, *antithesis*, dan sintesis sehingga menjadi modal dasar di dalam merumuskan kebijakan dan saat kebijakan diimplementasikan maka segala kemungkinan dan segala kecenderungan dapat diantisipasi sejak awal, sejak tesis dan *antithesis* diperdebatkan dalam memformulasikan sebuah kebijakan.

Penerapan pemikiran dialetika pemerintah memungkinkan kita untuk memahami dinamika kompleks yang terus tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang juga terus tumbuh dan berkembang. Kian banyak dan semakin tinggi tuntutan publik untuk mendapatkan pelayanan yang memadai dan manusiawi dari aparat pemerintah mengharuskan semakin baik dan meningkat pula kinerja birokrasi dan keterlibatan pejabat dalam menyelesaikan persoalan pembangunan.

Oleh karena itu pemaknaan terhadap dialektika menjadi penting dalam dimensi pemerintahan dan dimensi DM sebagai representasi kepala daerah, sehingga proses berpikir birokrat yang menyokong DM di Lembaga provinsi juga harus menginteraksikan dan melibatkan ide-ide yang berlawanan untuk kemudian dirumuskan pemahaman atau Kesimpulan artikel ini menegaskan bahwa kepemimpinan Dedi Mulyadi dapat dipahami melalui dialektika antara nilai budaya, gaya populis, dan kerangka ilmu pemerintahan. Artikel ini merekomendasikan perlunya penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komparatif untuk mengkaji model kepemimpinan lokal lainnya.

Sebagaimana dimaklumi, dalam dialektika, ada tiga elemen utama yakni: tesis, antitesis, dan sintesis. Tesis adalah ide awal, antitesis adalah ide yang berlawanan atau menentang tesis, dan sintesis adalah hasil dari penggabungan atau penyelesaian dari pertentangan diametral antara tesis dan antitesis.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dialektika membantu kita memahami berbagai sudut pandang dan mengeksplorasi berbagai aspek dari suatu masalah atau konsep. Dengan mempertimbangkan tesis dan antitesis, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam melalui sintesis.

Ilmu Pemerintahan

Istilah Ilmu Pemerintahan merupakan terjemahan dari istilah *bestuurskunde* atau *bestuurswentenschap* dalam bahasa Belanda. Istilah Ilmu Pemerintahan ini dipergunakan oleh Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 1957. Oleh karena itu, ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai hubungan pemerintah dengan yang diperintah. Sebagai ilmu yang secara sistematis mempelajari proses berpemerintahan di sebuah negara serta dinamika antara pihak yang mendapat mandat untuk memerintah serta masyarakat atau publik dalam posisinya yang harus taat kepada aturan main atau regulasi yang berlaku.

Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut *government* yang berasal dari bahasa Latin; *gubernare*. Sedangkan dalam bahasa Greek; *kybernan*, yang berarti mengemudikan atau mengendalikan. Ilmu pemerintahan bisa dikategorikan ilmu yang masih baru, yakni ilmu pengetahuan yang diterapkan (ilmu terapan). Karena itu, ia harus bekerja dengan bahan-bahan keterangan dari berbagai ilmu pengetahuan. Sedangkan C. F. Strong menyebutkan bahwa: *Government in the broader sense, is changed with the maintenance of the peace and security of state with in and with out. It must therefore, have first military power or the control of armed forces, secondly legislative power or the means of making laws, thirdly financial power or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending of state and of enforcing the law it makes on the states behalf.* Lebih kurang bisa diartikan bahwa pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan ke luar.

Sedangkan menurut R. Mac Iver: *Government is the organization of men under authority ...how men can be governed.* Lebih kurang bisa diartikan bahwa pemerintah itu adalah suatu organisasi dari orang-orang

yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu bisa diperintah. Jadi menurut Mac Iver, Ilmu Pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah (a science of how men are governed). Lain lagi pendapat Wilson: Government is last analysis, is organized force, not necessarily or invariably organized armed prepared by organization to realise its own purposes with references to the common affairs or the community. Lebih kurang bisa diartikan bahwa pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, melainkan dengan sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. Selanjutnya adalah pendapat Apter: Government is the most generalized membership unit possessing (a) defined responsibilities maintenance of the system of which it is a part and (b) a practical monopoly of coercive power. Pemerintah itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang (a) memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, dan (b) merupakan monopoli praktis dari kekuasaan yang memaksa.

PEMBAHASAN

Dialektika dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan

Dialektika dalam pemerintahan merujuk pada proses interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan publik. Dialektika dalam pemerintahan berperan dalam proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan berbagai perspektif.

Pemimpin, dalam hal ini kepala daerah, menerapkan pendekatan dialektis akan merespon tantangan dengan solusi menggabungkan berbagai sudut pandang. Sehingga apa yang disimpulkan senantiasa

berdasarkan hasil interkasi dinamis antara berbagai elemen politik, hukum, dan masyarakat terutama untuk proses pengambilan kebijakan.

Dalam konteks kepemimpinan DM dialetika melalui interaksi langsung dengan masyarakat tanpa melalui prosedur birokratis yang panjang, dengan beberapa karakteristik membuat kebijakan taktis mengutamakan efisiensi dan responsivitas dengan mengambil keputusan tanpa melalui proses rapat yang panjang, melainkan observasi langsung dan interaksi kepada masyarakat.

DM sebagai sosok yang memiliki pendekatan sangat unik dalam pemerintahan terutama gaya kepemimpinan dekat dengan masyarakat dalam menangani masalah seperti lingkungan, pendidikan, kesehatan tidak menunggu kajian akademik yang berlaurut-larut tetapi langsung turun lapangan untuk menindak pelanggaran, dan eksekusi. Pendekatan ini dapat sejalan dengan konsep *dynamic governance* yang mensyaratkan pentingnya pemimpin memiliki kapabilitas dinamis berpikir ke depan, berpikir ulang, dan berpikir lintas sektor, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat langsung cepat diterapkan dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat.

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, dialetika dapat muncul dalam kepemimpinan DM terutama dalam pendekatan komunikasi secara langsung dengan masyarakat sebagai konsep demokrasi partisipatif dimana pemimpin berusaha mengakomodasi aspirasi rakyat secara langsung baik melalui media sosial maupun interaksi langsung.

Ini mencerminkan teori demokratis partisipatif dimana kebijakan publik dibentuk berdasarkan aspirasi rakyat seperti larangan penggunaan hand phone di sekolah untuk mengatasi kecanduan media sosial di kalangan siswa, larangan membawa kendaraan motor ke sekolah, mengatasi penahanan ijazah berdasarkan interaksi langsung dengan orang tua siswa, termasuk mendidik disiplin anak-anak sekolah yang

bermasalah seperti tawuran, minuman keras, bolos sekolah, bekerjasama dengan TNI.

Kepemimpinan DM yang dilakukan secara dialektis tidak melihat dari satu sisi melainkan juga melakukan cek silang kepada pihak yang kontra secara dialogis. Efek positifnya dapat tergambar dari peningkatan ekonomi daerah naik Jawa Barat dari 5,2% menjadi 5,8% dalam tiga bulan pertama kepemimpinannya, pengurangan angka kemiskinan Jawa Barat dari 7,1% menjadi 6,5% dalam periode awal kepemimpinannya, dan peningkatan investasi masuk ke Jawa Barat meningkat 20% sehingga banyak proyek infrastruktur dan industri. Oleh sebab itulah sangat wajar jika kemudian dapat dikonklusikan bahwa dengan melakukan dialog secara langsung atau demokratis partisipatif DM dapat menyelesaikan masalah masyarakat secara cepat dan tanggap tanpa administrasi yang berbelit.

Dalam bekerja untuk rakyat DM selalu menyeimbangkan antara regulasi dan fleksibilitas dalam merespons kebutuhan masyarakat seperti pelarangan kepala sekolah mengadakan study tour, dan wisuda sekolah agar mengurangi beban orang tua dan meningkatkan efektifitas pendidikan, walaupun prosesnya mengalami pro dan kontra, namun DM menerapkan transparansi dan akuntabilitas eacara langsung melalui media social. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui apa rencana DM, seperti apa implementasinya, serta bagaimana pertanggungjawabannya.

Tentu saja DM tidak sebodoh sebagaimana yang dituduhkan sebab DM memiliki reputasi yang tidak diragukan serta DM sangat terbuka untuk dikritik. Hanya saja elit politik sebagian merasa gerah atau merasa kebakaran jenggot karena aib elit politik bukan saja menjadi terlihat setelah beberapa gebrakan kebijakan yang dilakukan DM tetapi juga sumber pandangan elit politik yang semakin berkurang karena kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan DM.

Langkah strategis dan taktis yang dilakukan DM sejalan dengan konsep reinventing government menurut Osborne dan Gaebler menekan bahwa pemerintahan yang efektif harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Selain itu DM juga mengembangkan keseimbangan antara regulasi dan fleksibilitas kinerja pemerintah, antara kepatuhan terhadap regulasi dan fleksibilitas dalam merespons kebutuhan masyarakat. Ada pendekatan yang lebih fleksibel dan berpihak pada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Philip Selznick bahwa organisasi pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan otoritas hukum, sehingga tidak saja kebijakan harus bertumbuh pada regulasi tapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial.

Meskipun pendekatan yang dilakukan DM mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat tidak sedikit pula yang melakukan kritik. Beberapa menilai yang dilakukan DM bahwa kebijakan taktis dapat mengabaikan aspek legal dan prosedural yang penting dalam pemerintahan, dan pendekatan ini memicu ketegangan politik, terutama DPRD Jawa Barat merasa bahwa gubernur kurang menghargai mekanisme legislatif dalam perumusan kebijakan.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan tindakan DM dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, tidak bisa dituding sebagai penyalahgunaan jabatan, justru sebagai pemegang otoritas eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat. DM memang sudah seharusnya loyal dan setia kepada rakyat. Kalau langkah-langkah DM pada beberapa sisi menimbulkan kegaduhan maka bisa dipastikan yang membuat gaduh justru bukan DM tapi elit partai dan elit birokratlah yang selama ini dimanjakan oleh sistem birokrasi yang

rigid dan oleh budaya ABS (Asal Bapak Senang) yang terlalu lama berlangsung.

Di awal tulisan disebutkan bahwa ada momentum yang berhasil dimanfaatkan oleh DM saat rakyat jengah dan jenuh dengan perilaku birokrat dan elit partai yang hanya pandai bermulut manis, kemudian mekanisme mesin birokrasi yang normatif dan serba formalistik, DM membuat terobosan dengan memanfaatkan keterkenalannya melalui platform digital media sosial sehingga apa yang dilakukannya menjadi mudah diakses oleh publik. Tidak ada lagi agenda tersembunyi di balik rapat-rapat tertutup. Dimensi transparansi dan akuntabilitas setiap saat dapat disimak dan dinilai sendiri oleh masyarakat Jawa Barat pada khususnya.

Oleh sebab itu seyogianya publik dapat dengan obyektif menilai sendiri apa yang telah dan sedang serta yang akan dijalankan oleh DM. Di sisi lain jika DM tidak konsisten, ia akan tergelincir seperti para pendahulunya. Yang utama dan terutama harus diperhatikan oleh DM adalah: Satu, konsisten berjuang berpihak kepada kepentingan rakyat Jawa Barat. Kedua, konsisten tidak korupsi. DM telah mengantongi harta dan tahta, satu lagi godaan wanita yang harus diwaspadai, sebab akan selalu ada pihak yang tidak senang kepada DM akan selalu merancang jebakan.

Mengoptimalkan peran pemerintah daerah secara guyub-kolaboratif, tidak one man show, kendati tantangannya rumit sebab budaya birokrasi yang tidak sehat selama ini, menjadi pekerjaan rumah DM ke depannya. Juga harus ada model sistem yang memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik terhadap kebijakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh DM selaku gubernur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustanir. (2022). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Penerbit Eureka Media Aksara.
- Affandi. (1982). Ilmu-ilmu Kenegaraan Suatu Studi Perbandingan, Unpad, Bandung.
- Ahmad Mustanir. (2023). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Penerbit Widinia.
- Audriana, S. 2018. Dialektika Marxis Sejarah & Kesadaran Kelas. (Terjemahan Bahasa Indonesia, Inyik Ridwan Muzir.) Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Bagus, Lorens, (2002). Kamus Filsafat, Cet. II. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Boon Shiong, Neo and Geraldine, Chen. (2007). Dynamic Governance Embending
- Firyal Akbar. (2023). Adaptive Governance: Peran dan Implementasinya. Deepublish
- Georg. (1997). Phenomenology of Spirit. Oxford University Press.
- Karl Marx. (1990). Das Kapital. Penguin Classics.
- Max Weber. (1978). Economy and Society. University of California Press.
- Muhadam Labobo. (2016). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Muhadam Labobo. (2015). Dialektika Ilmu Pemerintahan. Bogor Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nia Karniawati. (2015). Hakekat Ilmu Pemerintah (Kajian secara Filsafat). Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov. Vol 1 No 2.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. (2010). Law and Society in Transition; Toward Responsive Law, Bandung: Nusa Media.
- Osborne, David dan Gaebler, Ted. 1992 Reinventing Government: How the

Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Canada: Addison Wesley Publishing Company

Philip Selznick. (1957). Leadership In Administration. University of California Press.

Plato. (2000). The Republic. Cambridge University Press.

Poelje. (1953). Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan.

Ratnia Solihah. (2019). Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi 3). Penerbit Universitas Terbuka.

Ronald Heifetz. (1988). Leadership Expert: Harvard Kennedy School Exercising Leadership: The Politics of Change.

Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Refika Adiatama, Bandung. (2009).:20

Wijaya. (2018). Buku Ajar Good Governance (Tata Kelola Pemerintah Yang Baik). Jawa Tengah Penerbit Pustaka Magister.